

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS

**(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015,
Tentang Pajak Daerah Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana

Disusun oleh :

MARSIANUS DAGUT

18031000068



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS
(Studi Implementasi Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2015,
Tentang Pajak Daerah Kota Malang)

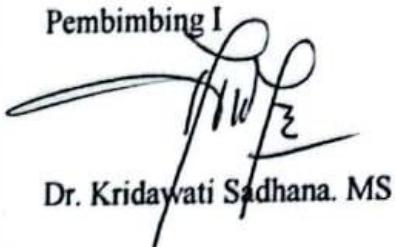
1. Nama : MARSIANUS DAGUT
2. Nim : 18031000068
3. Prodi : Administrasi Publik
4. Fakultas : Ilmusosial dan Ilmu Politik
5. Universitas : Universitas Merdeka malang

Malang 2022

Menyetujui.

Menyetujui.

Pembimbing I



Dr. Kridayati Sadhana, MS

Pembimbing II



Adhinda Dewi Agustine, S.AP, M.AP

Menyetujui.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Oleh Marsianus Dagut ini Telah Dipresentasikan Di Hadapan Tim Penguji

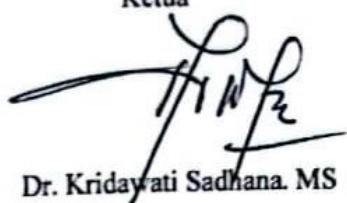
Hari : Senin

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

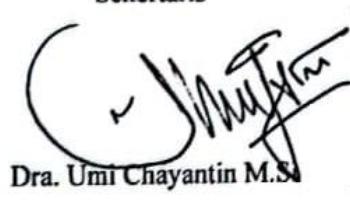
Susunan Tim Penguji

Ketua



Dr. Kridayati Sadhana, MS

Sekertaris



Dra. Umi Chayantin M.Si

Anggota



Adhinda Dewi Agustine, S.AP, M.AP

Mengesahkan



PERNYATAAN ORISINALITAS NASKA SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawa ini :

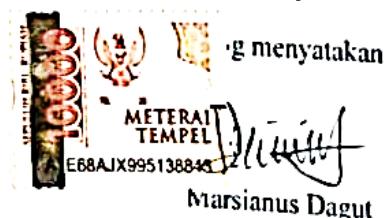
Naama : Marsianus Dagut
Nim : 18031000068
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Universitas : Merdeka Malang

Mengatakan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan mengenai skripsi yang telah saya susun sekarang ini :

1. Masih belum perna diajukan oleh orang lain dalam rangka memperoleh gelar akademik Sarjana Strata I.
2. Tidak memiliki kesamaan dengan karya-karya tulis ilmia yang sudah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain.
3. Setiap kutipan yang bersumber dari karya orang lain pada naska ini, selalu disebut sumber referensinya dan tertulis secara resmi didalam daftar pustaka.

Atas dasar pernyataan tersebut, apabila didalam naska ini terbukti unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menyatakan karya tulis ilmia akademik skripsi ini digugurkan dan dengan segala konsekuensi yang menyertainya termasuk pembatalan gelar akademik yang diperoleh, bahkan bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdknas pasal : 20 ayat 2 dan pasal 70) serta panduan pencegahan plagiasi yang telah ditetapkan oleh keputusan Dekan FISIP Universitas Merdeka Malang No, Kep.12.a/fisip/um/vii/2016 tanggal 7 juli 2016.

Malang, April 2022



MOTTO

**KAMU TIDAK BISA KEMBALI DAN MENGUBAH MASA LALU, MAKAN DARI
ITU TATAPLAH MASA DEPAN DAN JANGAN BUAT KESALAHAN YANG SAMA
UNTUK YANG DUA KALI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat tuhan yang maha Esa, karena atas berkat rahmatnya yang berlimpah sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul Skripsi yang saya ajukan yaitu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos (“Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Kota Malang”.)

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi diFakultas Ilmu Sosial dan Politik universitas merdeka malang. Tidak dapat disangkah bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran, dalam penyelesaian penggerjaan Skripsi. Namun disadari karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Dr. Yuntawati Fristin M.AB, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Chandra Dinata. S.Sos. M.AP, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Dr. Kridawati Sadhana, Ms, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan berbagai pengalaman kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
4. Adhinda Dewi Adustine, S.AP,M.AP, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan berbagai pengalaman yang telah diberikan. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah di Universitas Merdeka Malang

dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Bapa dalam kerajaan surga. Dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS NASKA SKRIPSI	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA DASAR TEORI	10
2.1. Tori Kebijakan Publik	10
2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	13
2.3. Pendapatan Asli Daerah	15
2.4. Sumber Pendapatan Asli Daerah	17
2.5. Teori pajak Daerah	18
2.5.1. Pengertian Pajak	19
2.5.2. Fungsi Pajak	21
2.5.3. Mekanisme Pemungutan Pajak	22
2.5.4. Syarat Pemungutan pajak	24
2.5.5. Jenis Pajak Daerah	25

2.6. Pajak Rumah Kos	27
2.5.1. Pengertian Rumah Kos	27
2.7. Sistem pemungutan Pajak Rumah Kos	28
2.6.1. Menghitung Potensi Pajak Rumah Kos di Kecamatan, Sukun Kota Malang.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Fokus Penelitian	31
3.3. Data dan Jenis Data	33
3.4. Teknis Pengumpulan Data	34
3.5. Model Analisis Data	37
3.5.1. Analisis Deskriptif Kualitatif	38
3.6. Lokasi Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1. Kondisi Geografis Badan Pendapatan Kota Malang	40
4.1.2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Malang	42
4.1.3. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang	44
4.1.4. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang	45
4.1.5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang	46
4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daera Kota Malang	49
4.2. Penyajian Data	53
4.2.1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015, Tentang pajak Daerah Kota Malang.....	53
4.2.2. Unsur Pendorong dan Penghambat dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos Berdasarkan peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Kota Malang.....	61

4.2.2.1. Unsur Pendorong Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Malang	61
4.2.2.2. Unsur Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos diKota Malang	63
4.3 Pembahasan	70
4.2.1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015, Tentang pajak Daerah Kota Malang.....	70
4.2.2. Unsur Pendorong dan Penghambat dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos Berdasarkan peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Kota Malang.....	72
4.2.2.1. Unsur Pendorong Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Malang	72
4.2.2.2. Unsur Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos diKota Malang	73
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPITAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta Kota Malang	91
Gambar 4.1.3 : Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang	92
Gambar 5.1.5 : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang	93
Gambar 4.1.6 : Pendaftaran Wajib Pajak Rumah Kos Dikota Malang	94
Gambar 4.2 : Hasil Wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang ..	95
Gambar 4.2.1 : Hasil Wawancara dengan pemilik Rumah Kos	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing	97
Lampiran 2. Berita Acara	98
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan	99
Lampiran 4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Plagiasi	100

ABSTRAK

Marsianus Dagut 18031000068: Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Kota Malang)* Kridawati Sadhana, Adhinda Dewi Agustine.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan daerah sebagai sumber dana utama terbesar yang sangat penting peranannya bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagian besar pembangunan di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Sehingga kepada pihak yang tidak mau dan belum mempunyai kesadaran akan kewajiban membayar pajak maka dapat dipaksakan dalam penagihannya, yaitu dengan dilakukan penagihan menggunakan surat paksa ataupun penyitaan. Dengan akan diterapkannya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pajak daerah tentu akan menimbulkan berbagai argumen dan persepsi yang berbeda pada para pemilik rumah kos.

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan secara ilmiah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos dikota malang. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan unsur unsur pendorong dan penghambat dalam melakukan pemungutan pajak dikota malang.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menggambarkan bagaimana pandangan pemilik rumah kos terhadap PeraturanDaerah Kota malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kos.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah kosterkait pajak kos dikarenakan sampai saat ini sebagian besar dari mereka hanya mendapat informasi dari media. Selain itu didapatkan hasil bahwa tarif pajak kos sebesar 5% dirasa sudah wajar namun kriteria objek pajak dirasa kurang adil. Sedangkan untuk mekanisme pemungutan pajak sudah dirasa sesuai oleh para pemilik kos. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya sosialisasi langsung dan merata serta pendataan dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya terbatas pada jumlah kamar dan harga perkamarnamun pemerintah harus melihat pendapatan yang diterima dari hasil sewa rumah kostersebut.

Kata kunci : Pelaksanaan pemungutan pajak Rumah Kos

ABSTRACT

Marsianus Dagut 18031000068: Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Merdeka University Malang, *Implementation of Boarding House Tax Collection (Study on Policy Implementation Based on Regional Regulation No. 2 of 2015 concerning Local Taxes in Malang City)* Kridawati Sadhana, Adhinda Dewi Agustine.

Tax is one of the state and regional revenues as the largest main source of funds which has a very important role for the implementation of national development. Taxes are used to finance development that is useful for the common interest with the aim of increasing the welfare and prosperity of the community. Most development in Indonesia is financed from tax revenues. Until now there are still many parties who do not have the awareness to pay taxes. So that those who do not want and do not have awareness of the obligation to pay taxes can be forced to collect them, namely by collecting them using forced letters or confiscation. With the implementation of the boarding house tax collection in Malang City as described in the Malang City Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning local taxes, it will certainly cause various arguments and different perceptions for boarding house owners.

The purpose of this study was to describe scientifically the implementation of the collection of boarding house taxes in the city of Malang. In addition, this research was also conducted to identify and describe the elements of driving and inhibiting tax collection in the city of Malang.

The method used in this research is using qualitative methods with descriptive research types. This study describes how the views of boarding house owners on the Malang City Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning local taxes, especially boarding house taxes.

The results of this study indicate that the lack of knowledge of boarding house owners regarding boarding taxes is because until now most of them have only received information from the media. In addition, it was found that the boarding tax rate of 5% was considered reasonable but the criteria for the tax object were deemed unfair. Meanwhile, the tax collection mechanism has been deemed appropriate by the boarding house owners. For this reason, the recommendation from the author is the need for direct and equitable socialization as well as data collection from the government and a review of regulations related to the amount of the boarding tax rate and the need for additional criteria for the object of the boarding tax which is not only limited to the number of rooms and room rates, but the government must look at the income received from the rental. the boarding house.

Keywords: Implementation of boarding house tax collection